



**DISKOP
UKM**

DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BATU BARA

RENCANA STRATEGIS

2024-2026

Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Batu Bara



diskopukmbatubara



DISKOPUKM BATUBARA



Dinas Koperasi UKM Batubara



diskopukm.batubarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2024-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara. Rencana strategis ini merupakan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang disesuaikan dengan pagu indikatif, sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan dan keterpaduan dalam penjabaran program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara harus menjabarkan rencana strategis ini dalam bentuk program yang operasional dan menunjukkan keterkaitan serta keterpaduan antar berbagai kegiatan baik dalam Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, maupun antar Perangkat Daerah terkait. Dengan demikian, Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan jawaban dari masalah sekaligus langkah-langkah mengatasinya yang tercermin dari program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kedepan. Diharapkan kepada semua pihak yang terkait dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dapat memanfaatkan Renstra ini sebagai acuan dan masukan terutama dalam meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini belum sempurna dan memerlukan masukan dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Rencana Strategis ini.

Ditetapkan di : Indrasakti

Tanggal :

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BATU BARA**



ARIF HANAFIAH, S.STP.

NIP. 198711152006021002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi.....	3
Daftar Gambar	4
Daftar Gambar	5
Bab I Pendahuluan.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	23
2.2.2 Aset	25
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD	54
2.4.1 Tantangan.....	54
2.4.2 Peluang.....	54
BAB III Permasalahan Dan Isu Isu Strategis Perangkat Daerah	56
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	56
3.2. Telaahan Renstra Kementerian Renstra Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah R.I	58
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	59
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.....	60
BAB IV Tujuan Dan Sasaran	61
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	61
4.2 Cascading Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Batu Bara	62
BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan	63
BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	66
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	86
BAB VIII Penutup.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah.....	12
Gambar 4. 1 Cascading Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Batu Bara	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	23
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	24
Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon	25
Tabel 2. 5 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara.....	25
Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara	27
Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	31
Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ...	56
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Batu Bara	61
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	64
Tabel 6. 1 Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan	67
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan focus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kerzner menyebutkan bahwa Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.

Pendapat lain diuraikan oleh Robert N. Anthony yaitu bahwa perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun depan. Rencana Strategis adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 52 Tahun 2022 mengamanatkan kepada Gubernur / Bupati / Walikota dengan masa jabatan berakhir tahun 2023 dan daerah otonom baru agar menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi / Kabupaten / Kota Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026. Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada Tahun 2024-2026 dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan. Renstra Tahun 2024-2026 ini disebut Renstra Antara. Oleh karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan

merupakan turunan dari tahapan renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 merupakan dokumen komprehensif berwawasan 3 (tiga) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Batu Bara untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di urusan Koperasi dan UKM serta target yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 3 (tiga) tahun ke depan dengan fokus utama pelayanan adalah menggerakkan ekonomi rakyat, percepatan pembangunan, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan rakyat dalam kerangka kehidupan masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan beberapa uraian tersebut, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara menyusun perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;
 12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara I-5 Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Acara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Revisi atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 I-6 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
 26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2005-2025;
 27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040;
 29. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 30. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi

Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencanan Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun;
2. Menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Sebagai dasar komitmen bersama antara unit kerja dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah sektor koperasi dan UKM;

Sedangkan tujuannya disusunnya dokumen Rencana Strategi ini adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang yang sejalan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara dan juga sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024-2026 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II paling sedikit memuat:

1. Tugas, fungsi dan struktur PD;
2. Sumber daya PD;
3. Kinerja pelayanan PD (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya);
4. Kelompok sasaran layanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III paling sedikit memuat:

1. Permasalahan pelayanan PD (berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab

II); dan

2. Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada:
 - a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026; dan/atau
 - b. Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
2. Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output* serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI paling sedikit menguraikan program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII paling sedikit memuat:

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII PENUTUP

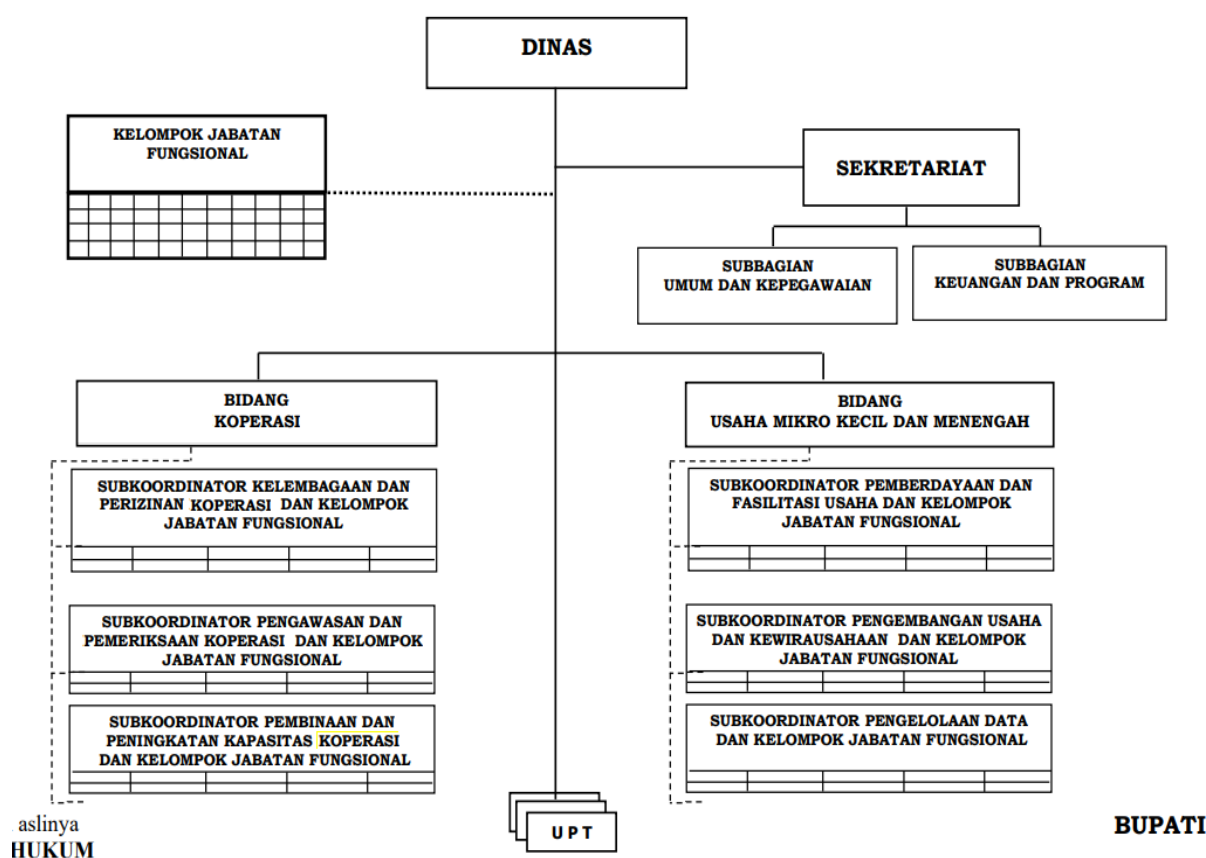
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

Masing-masing komponen dalam struktur organisasi tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing, beberapa tugas dan fungsi beberapa komponen tersebut khususnya untuk Kepala Dinas dan struktur satu level di bawah Kepala Dinas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan arah pembangunan daerah;
- b. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan berlaku;
- c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas kepada bawahan secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik;
- d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat dan bidang teknis untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah terkait tugas pokok dan fungsi di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Mengkoordinir kegiatan penyelenggaraan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara yang meliputi urusan tata usaha, urusan keuangan, urusan kepegawaian serta urusan perencanaan program;
- h. Mengkoordinir kegiatan pembinaan dan mengurus kegiatan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta dunia usaha lainnya;
- i. Membina dan melaksanakan kerja sama dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan instansi Pemerintah, BUMN serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah;
- j. Menilai hasil kerja bawahan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta visi dan arah pertimbangan daerah serta terdahulu dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan tugas dan permasalahannya;
- c. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada para Subbagian agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- d. Mengkoordinasikan pada Kepala Bidang dan Subbagian di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. Mengkoordinir pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan barang inventaris, pengelolaan perlengkapan kantor, serta keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta kesejahteraan pegawai;
- h. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan serta pembinaan pegawai;
- i. Mengkoordinir pelaksanaan tugas, menyusun bahan perencanaan dan program kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta menyusun bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- j. Menilai prestasi kerja Kepala Subbagian pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut bidang pelayanan administrasi dan kebutuhan pada satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- c. Menganalisa kegiatan staf di lingkungan Subbagian untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan;
- d. Melaksanakan agenda surat menyurat, kearsipan, dan ekspedisi;
- e. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana serta rumah tangga Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor, administrasi perjalanan dinas dan pelayanan kebutuhan pegawai;
- g. Mengatur, memelihara mengelola kebersihan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas, barang inventaris dan perlengkapan kantor lainnya;
- h. Memberikan pelayanan dan informasi terhadap tamu-tamu sesuai dengan maksud dan tujuannya;
- i. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES, cuti pegawai, pemberian penghargaan serta pengkoordinasian penyusunan SKP;
- j. Menyusun analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai.

4. Subbagian Keuangan dan Program

Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Program dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- c. Menganalisa kegiatan staf di lingkungan Subbagian Keuangan dan Program untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan;

- d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Subbagian Keuangan dan Program;
- e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka menyusun program kerja Dinas sesuai dengan visi dan arah pembangunan yang telah ditetapkan;
- f. Menyiapkan data untuk penyusunan anggaran program koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan;
- g. Penyusunan RENSTRA, RENJA, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, LPPD dan LKPJ;
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pembukuan keuangan, penyusunan pertanggungjawaban, penyusunan laporan keuangan dan verifikasi keuangan;
- i. Mengkoordinir dan memonitor laporan keuangan dan program terkait belanja pegawai, belanja rutin non pegawai dan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Subbagian Keuangan dan Program;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan permasalahannya.

5. Kepala Bidang Koperasi

Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan menyusun kegiatan bidang koperasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Mengatur dan memfasilitasi dukungan penguatan bidang koperasi, Subkoordinator Kelembagaan dan Perizinan Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional, Subkoordinator Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Memverifikasi data dan jumlah koperasi, dokumen izin usaha simpan pinjam yang akurat dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten;

- e. Mengkoordinasikan bimbingan, penyuluhan dan pembentukan serta pembuatan laporan koperasi;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan koperasi;
 - g. Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dalam penilaian kesehatan dan keaktifan koperasi yang wilayah keanggotannya dalam 1 (satu) Kabupaten;
 - h. Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
 - i. Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi dalam peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi yang wilayah keanggotannya dalam 1 (satu) Kabupaten;
 - j. Memverifikasi dan merekomendasikan penerbitan Badan Hukum Koperasi;
 - k. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
 - l. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
 - m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Subkoordinator Kelembagaan dan Perizinan Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional Subkoordinator Kelembagaan dan Perizinan Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 - b. Memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 - c. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
 - d. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas;
 - e. Mengkoordinasikan pertumbuhan koperasi perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
 - f. Mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam perubahan laporan tahunan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;

- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - h. Menyiapkan bahan untuk memberikan perlindungan kepada koperasi;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subkoordinator berdasarkan realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya;
 - j. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas Subkoordinator kepada kepala bidang;
 - k. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
 - l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Subkoordinator Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional
- Subkoordinator Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten;
 - b. Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya adalah 1 (satu) Kabupaten;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - d. Mengkoordinasikan upaya menciptakan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
 - e. Mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - f. Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
 - g. Melaksanakan teknis pendampingan dan konsultasi dengan lembaga terkait;
 - h. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
 - i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran.

8. Subkoordinator Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan pemberdayaan usaha koperasi;
- b. Menyiapkan bahan untuk fasilitasi pemberdayaan usaha koperasi;
- c. Merencanakan dan menyusun kegiatan dalam peningkatan kualitas sdm koperasi;
- d. Merencanakan dan menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- e. Menjalin koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan, fasilitasi peningkatan kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- f. Mengkoordinasikan perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- h. Menyusun dan memberikan laporan dan evaluasi kegiatan pembinaan pemberdayaan usaha koperasi;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran.

9. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan menyusun kegiatan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan, fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kewirausahaan serta pengelolaan data;

- d. Mengkoordinasikan pendataan izin usaha dan memfasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro kecil dan menengah;
 - e. Memverifikasi perolehan dana usaha mikro kecil dan menengah dari lembaga keuangan/BUMN maupun dari instansi lembaga lainnya;
 - f. Menjalin koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan, fasilitasi pengembangan usaha dan kewirausahaan dengan BUMN, swasta maupun instansi lembaga lainnya;
 - g. Memfasilitasi dan mengevaluasi melalui pembinaan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan, penumbuhan iklim usaha dan pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah;
 - h. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan, produksi dan pengolahan, pemasaran, peningkatan sumber daya pelaku usaha dalam hal desain dan teknologi dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
 - i. Memberikan pelayanan konsultasi usaha mikro kecil dan menengah terhadap masyarakat yang memerlukan penjelasan tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
 - j. Mengkoordinasikan penyelenggaraan promosi dan pameran, workshop bisnis, networking dan layanan pustaka entrepreneur;
 - k. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang belum dilaksanakan;
 - l. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
 - m. Melakukan tugas kedinasan lain diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
10. Subkoordinator Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Subkoordinator Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan dan menyusun kegiatan Subkoordinator pemberdayaan usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan usaha dalam penumbuhan iklim usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. Melaksanakan kegiatan Subkoordinator Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha dan

Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan program kerja untuk bahan penyempurnaan program selanjutnya;

- d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan fasilitasi kemitraan serta kerjasama pengembangan melalui pola kemitraan usaha;
- e. Menyiapkan bahan untuk pendataan izin usaha dan memfasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro kecil dan menengah;
- f. Menyiapkan bahan untuk fasilitasi produksi pirt, bpom, dan halal mui serta izin lainnya yang mendukung pengembangan usaha dan kewirausahaan;
- g. Merencanakan dan memfasilitasi agar munculnya akses pasar bagi usaha dan kewirausahaan;
- h. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas Subkoordinator kepada kepala bidang;
- i. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas- tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- j. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya.

11. Subkoordinator Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan menyusun kegiatan Subkoordinator Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan untuk verifikasi perolehan dana usaha mikro dari Lembaga Keuangan/BUMN maupun dari instansi lembaga lainnya;
- c. Menyiapkan bahan untuk pembinaan dan pelatihan pengembangan kewirausahaan, produksi dan pengolahan, pemasaran, peningkatan sumber daya pelaku usaha dalam hal desain dan teknologi dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;

- d. Menyiapkan pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi promosi dan pameran, workshop bisnis, networking dan layanan pustaka entrepreneur;
- e. Merencanakan pengembangan usaha dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- f. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengembangan dan penyebaran informasi pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Subkoordinator kepada kepala bidang;
- h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas- tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- i. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

12. Subkoordinator Pengelolaan Data dan Kelompok Jabatan Fungsional

Subkoordinator Pengelolaan Data dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengelolaan basis data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan analisis data dan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rumusan pengolahan data pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Menyusun pola, sistem dan teknis pencapaian serta pelaksanaan program bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan melaporkan pencapaian kinerja atas program-program yang sudah dan belum dilaksanakan;
- f. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas Subkoordinator kepada kepala bidang;
- g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas- tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

- h. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara saat ini memiliki jumlah sumber daya manusia yang sangat terbatas. Dengan melaksanakan urusan yang saat ini sangat penting yaitu sektor ukm, jumlah personil yang ada harus benar-benar dioptimalkan sehingga target kinerja organisasi dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH	RASIO	KETERANGAN
1.	Pegawai Negeri Sipil	12 orang	19,6 %	
2.	CPNS	15 orang	24,6 %	
3.	TKS	19 orang	31,1 %	
4.	Tenaga Pendamping IT	3 orang	4,9 %	
5.	Tenaga Pendamping UMKM	7 Orang	11,47 %	
6.	Tenaga Pendamping DAK PK2UKM	2 Orang	3,27 %	
7.	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)	3 Orang	4,9 %	
	Total	61 Orang	100 %	

Khusus untuk personil PNS, dapat dilihat komposisi berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	CPNS	TKS		
1	SMA	2		14	16	27,58 %
2	D3	4	1	2	7	12,06 %

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	CPNS	TKS		
3	S1	6	14	15	35	60,34 %
4	S2					
Jumlah		12	15	31	58	100 %

Dari tabel diatas, komposisi pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara berdasarkan tingkat pendidikannya sudah cukup ideal. Namun masih banyak ditemukan kualifikasi jabatan yang kurang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kurang optimal. Komposisi PNS dilihat berdasarkan golongan ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	CPNS		
1	Gol I				
2	Gol II	1	1	2	7,40 %
3	Gol III	10	14	24	88,88 %
4	Gol IV	1		1	3,70 %
Jumlah		12	15	27	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah terbesar personil PNS yang ada adalah untuk Golongan III sebanyak 24 orang atau sebesar 88,88%. Sementara itu PNS Golongan II sebanyak 7,40% dan PNS Golongan IV sebanyak 3,70%. Sementara komposisi PNS berdasarkan jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No.	Tingkat Eselon	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon	Alokasi JabatanEselon	Jabatan Eselon yang kosong
1	II b	1	1	-
2	III a	3	3	-
3	III b	-	-	-
4	IV a	4	8	4
	Jumlah	8	8	4

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jabatan eselon sudah terisi, tetapi eselon IV a memiliki 4 jabatan eselon yang kosong. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan seoptimal mungkin maka kualitas dan kompetensi personil yang ada harus terus ditingkatkan baik dari sisi kualitas teknis maupun kualitas mental spiritual.

2.2.2 Aset

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara memiliki aset atau sarana prasarana yang mendukung berjalannya pelayanan untuk menunjang kinerja perangkat daerah, sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara

No	Nama Aset	Jumlah (Unit)
Gedung dan Bangunan		
1	Kantor Dinas Koperasi dan UKM	1 Unit
2	Rumah Kemasan	1 Unit
3	Rumah Batik	1 Unit
4	Workshop UMKM	1 Unit
5	Gedung Dekranasda	1 Unit
6	Rest Area	1 Unit
Kendaraan Dinas Jabatan		

1	Mobil Kepala Dinas	1 Unit
Kendaraan Dinas Operasional		
1	Mobil Operasional	4 Unit
Kendaraan Operasional Roda 2		
1	Sepeda Motor	5 Unit
Peralatan dan Mesin		
1		
Sarana dan Prasarana Kerja		

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2019- 2023 tersaji pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2. 6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019																	
1	Persentase Usaha Mikro Yang Mengalami Peningkatan Skala Usaha	%	5					3,69					73,8				
2	Persentase Koperasi Aktif	%	35					21,35					61				
3	Persentase Pertumbuhan Omset Penjualan Produk UMKM/IKM Unggulan Daerah	%	5					5,78					116				

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Persentase UKM/IKM Unggulan Daerah yang memanfaatkan Teknologi Informasi dalam memasarkan produknya	%	5					4,23					84,6				
5	Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	%	0,2					0,07					35				
6	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	5					4,41					88,2				
7	Jumlah Sentra Industri Kecil dan Menengah	sentra	1					1					100				
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020																	
1	Persentase Pertumbuhan Aset Koperasi	%		9,13					0,05					0,55			
2	Persentase Peningkatan SHU Koperasi	%		5					0,71					14,20			

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro ke Usaha Kecil	%		5,24					4,16					79,39			
4	Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Kecil ke Usaha Menengah	%		5,56					1,34					24,10			
5	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	%		16,56					17,48					105,6			
6	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%		5					3,98					79,6			
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021																	
1	Persentase peningkatan level skala usaha mikro ke usaha kecil	%			1,5					0,49	-	-	130	83,2	32,7		
2	Persentase peningkatan level skala usaha kecil ke usaha menengah	%			1					0	-	-	121	67	0		

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Persentase peningkatan aset Koperasi	%			5,54					9	-	-	86,5	0,45	162		
4	Persentase peningkatan SHU Koperasi	%			19,14					1	-	-	66,1	7,88	5,22		
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 dan 2023																	
1	Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan Aset Koperasi	%				8	10										
2	Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi	%				3,75	4										
3	Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro	%				0,5	0,55									-	-
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	%	B	B	B	BB	BB	B	B	B	BB	-	B	B	BB	-	-

Tabel 2. 7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Tahun ke-		Rasio antara Realisasi Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(4)	(5)	(9)	(10)	(14)	(15)	(17)	(18)
Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	-	200.000.000	-	200.000.000	-	100		
Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah		200.000.000		200.000.000	-	100		
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1.334.775.000	675.500.000	1.329.729.020	672.566.390	100	100		
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	250.000.000	192.000.000	248.908.414	189.523.831	100	99		
Pembinaan sertifikasi produksi PIRT bagi pelaku UMKM	90.000.000		89.200.000		99	-		
Fasilitasi pengembangan kemasan produk usaha mikro kecil dan menengah	100.000.000		100.000.000		100	-		
Fasilitasi pendampingan dan layanan konsultasi bagi usaha mikro kecil dan menengah	44.775.000		44.775.000		100	-		
Fasilitasi keikutsertaan pameran pekan raya Sumatera Utara	300.000.000	396.000.000	299.854.400	395.725.125	100	100		

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Tahun ke-		Rasio antara Realisasi Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(4)	(5)	(9)	(10)	(14)	(15)	(17)	(18)
Fasilitasi keikutsertaan pameran INACRAFT	80.000.000		79.159.911		99	-		
Fasilitasi keikutsertaan pameran Hari Jadi Dekranas	150.000.000		148.970.062		99	-		
Fasilitasi penguatan kelembagaan ekonomi kreatif	320.000.000	87.500.000	318.861.233	87.317.434	100	100		
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	130.000.000	143.435.000	128.136.607	143.155.000	99	100		
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	100.000.000		98.167.107		98	-		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	30.000.000		29.969.500		100	-		
Fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan aneka usaha koperasi		143.435.000		143.155.000	-	-		
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Koperasi dan UKM	448.000.000	417.358.000	444.690.986	414.897.000	99	99		
Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koperasi	123.315.000		121.615.000		99	-		
Pelatihan Manajemen Bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi	120.544.000		118.944.000		99	-		
Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Kelapa Terpadu	95.135.000		95.135.000		100	-		

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Tahun ke-		Rasio antara Realisasi Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(4)	(5)	(9)	(10)	(14)	(15)	(17)	(18)
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	109.006.000		108.996.986		100	-		
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM		417.358.000		414.897.000	-	99		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	793.100.000	564.745.374	786.745.631	551.671.046	99	98		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	90.000.000	109.995.924	85.668.566	97.157.590	95	88		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.600.000	100	99		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.000.000	15.000.000	19.725.000	15.000.000	99	100		
Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000	39.206.450	39.565.000	39.206.450	99	100		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000	20.000.000	24.900.000	20.000.000	100	100		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	10.000.000	9.935.000	10.000.000	99	100		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000	14.000.000	30.000.000	14.000.000	100	100		
Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000	31.250.000	39.930.000	31.246.000	100	100		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350.000.000	155.000.000	349.599.065	154.968.006	100	100		

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Tahun ke-		Rasio antara Realisasi Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(4)	(5)	(9)	(10)	(14)	(15)	(17)	(18)
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	101.800.000	94.000.000	101.700.000	94.000.000	100	100		
Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	34.800.000	29.493.000	34.523.000	29.493.000	99	100		
Penyediaan jasa pengemudi kendaraan dinas jabatan dan operasional	28.700.000	24.000.000	28.400.000	24.000.000	99	100		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	357.200.000	459.222.000	356.482.900	456.516.200	100	99		
Pengadaan peralatan gedung kantor	40.000.000	64.500.000	39.990.000	64.198.000	100	100		
Pengadaan mebeleur	10.000.000	83.000.000	9.995.000	82.956.200	100	100		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000	161.722.000	30.000.000	147.970.000	100	91		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	277.200.000	150.000.000	276.497.900	161.392.000	100	108		
Program peningkatan disiplin aparatur	45.000.000	80.000.000	44.982.000	79.904.000	100	100		
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	45.000.000	80.000.000	44.982.000	79.904.000	100	100		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	-	20.000.000	-	100	-		

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Tahun ke-		Rasio antara Realisasi Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(4)	(5)	(9)	(10)	(14)	(15)	(17)	(18)
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20.000.000		20.000.000		100	-		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000	25.350.000	23.940.000	25.300.000	96	100		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.000.000	15.350.000	14.595.000	15.300.000	97	100		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.000.000	10.000.000	9.345.000	10.000.000	93	100		
Program Peningkatan Perencanaan Kinerja dan Keuangan	10.000.000	-	9.700.000	-	97	-		
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD	10.000.000		9.700.000		97	-		
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	30.000.000	30.000.000	28.200.000	30.000.000	94	100		
Pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP)	30.000.000	30.000.000	28.200.000	30.000.000	94	100		
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	3.385.000.000	160.000.000	3.254.982.400	148.150.000	96	93		

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Tahun ke-		Rasio antara Realisasi Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(4)	(5)	(9)	(10)	(14)	(15)	(17)	(18)
Monitoring dan Penyebarluasan Informasi Pasar	35.000.000		32.800.000		94	-		
Revitalisasi Pasar Rakyat	3.350.000.000	160.000.000	3.222.182.400	148.150.000	96	93		
Monitoring dan penyebaran informasi perkembangan harga komoditas perdagangan		18.000.000		17.992.010	-	100		
Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah		210.000.000		210.000.000	-	100		
Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar		200.000.000		198.141.000	-	99		
Pengadaan sarana dan prasarana		205.000.000		203.955.000	-	99		
Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pasar	1.271.691.000	-	1.098.871.555	-	86	-		
Penyediaan Sarana dalam mendukung pembentukan unit Metrologi Legal	1.271.691.000		1.098.871.555		86	-		
Program Dana Bagi Hasil	100.000.000	-	100.000.000	-	100	-		
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai	100.000.000		100.000.000		100	-		
Program pengembangan industri kecil dan menengah	355.225.000	95.237.500	355.016.200	94.938.723	100	100		

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Tahun ke-		Rasio antara Realisasi Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(4)	(5)	(9)	(10)	(14)	(15)	(17)	(18)
Pelatihan kerajinan kelapa terpadu	105.225.000	95.237.500	105.128.600	94.938.723	100	100		
Pelatihan kemampuan kreatifitas dan inovasi tenun	100.000.000		100.000.000		100	-		
Fasilitasi Pengembangan Industri Kreatif	150.000.000		149.887.600		100	-		
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	-	200.000.000	-	199.672.000	-	100		
Fasilitasi pengembangan dan penguatan sentra industri kecil menengah potensial		200.000.000		199.672.000	-	100		
	8.304.991.000	3.050.847.874	6.752.905.744	3.016.770.359	81	99		

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio antara Realisasi Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.339.716.809	5.606.952.711	5.912.314.974	3.209.221.455	5.462.070.591		96,1	97,42		37	70
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.153.068	14.949.253	7.207.576	7.092.000	14.507.000		99,1	97,04		29	105
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.498.164	4.983.890	2.397.810	4.459.000	4.947.000		99,1	99,26		(21)	11
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.272.020	4.983.890	2.018.540	1.262.000	4.926.000		99,2	98,84		116	290
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.382.884	4.981.473	2.791.226	1.371.000	4.634.000		99,1	93,02		108	238
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.606.492.846	1.886.751.550	2.057.887.477	1.539.288.010	1.792.496.829		95,8	95		13	16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.604.952.419	1.876.780.678	2.054.100.645	1.537.760.010	1.782.590.829		95,8	94,98		13	16

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio antara Realisasi Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	962.767	4.985.456	1.743.416	955.000	4.982.000		99,2	99,93		176	422
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	577.660	4.985.416	2.043.416	573.000	4.924.000		99,2	98,77		352	759
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	-		15.000.000	-		100,0			-	- 100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-		-	-					-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	-		15.000.000	-		100,0			-	- 100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	482.805.193	1.002.444.518	1.831.001.312	461.993.661	995.732.687		95,7	99,33		95	116
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.974.087	25.992.739	19.998.823	9.899.000	25.900.000		99,2	99,64		69	162

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio antara Realisasi Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.564.679	41.624.778	29.603.000	36.093.500	41.531.500		98,7	99,78		(8)	15
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.816.069	50.000.000	80.000.000	14.728.000	49.991.000		99,4	99,98		149	239
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.544.098	9.995.668	12.023.400	15.488.500	9.995.000		99,6	99,99		(8)	- 35
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	108.000.000	72.000.000	18.000.000	108.000.000		100,0	100		233	500
Penyediaan Bahan/Material	15.006.260	9.998.599	16.000.089	14.540.800	9.943.500		96,9	99,45		13	- 32
Fasilitasi Kunjungan Tamu		266.832.734	256.376.000		266.320.000			99,81		-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	372.900.000	490.000.000	1.345.000.000	353.243.861	484.051.687		94,7	98,79		103	37
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	733.275.702	1.406.667.390	675.810.029	730.188.000	1.400.878.200		99,6	99,59		20	92

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio antara Realisasi Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	365.000.000	-		363.000.000	-		99,5			-	- 100
Pengadaan Mebel	46.289.311	-		46.210.000	-		99,8			-	- 100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	321.986.391	1.406.667.390	675.810.029	320.978.000	1.400.878.200		99,7	99,59		142	336
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.040.000	596.120.000	616.678.580	298.826.976	564.764.211		95,8	94,74		47	89
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	12.000.000	8.000.000	6.000.000	12.000.000		100,0	100		33	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000	207.600.000	135.998.580	43.786.976	180.244.211		76,8	86,82		115	312
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	249.040.000	376.520.000	472.680.000	249.040.000	372.520.000		100,0	98,94		38	50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.950.000	700.020.000	723.730.000	156.832.808	693.691.664		85,7	99,1		143	342

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio antara Realisasi Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.420.000	50.420.000	49.600.000	45.851.849	49.198.432		89,2	97,58		(2)	7
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.540.000	109.910.000	158.380.000	101.095.959	109.865.125		83,2	99,96		17	9
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		29.690.000	97.750.000		29.630.000			99,8		-	-
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.990.000	510.000.000	418.000.000	9.885.000	504.998.107		98,9	99,02		2.494	5.009
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	15.489.820	40.000.000	39.974.224	15.274.000	38.566.553		98,6	96,42		79	152

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio antara Realisasi Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.489.820	40.000.000	39.974.224	15.274.000	38.566.553		98,6	96,42		79	152
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.489.820	40.000.000	39.974.224	15.274.000	38.566.553		98,6	96,42		79	152
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	39.996.184	39.999.666	41.613.780	39.830.000	39.679.350		99,6	99,2		2	- 0
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.996.184	39.999.666	41.613.780	39.830.000	39.679.350		99,6	99,2		2	- 0

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio antara Realisasi Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	39.996.184	39.999.666	41.613.780	39.830.000	39.679.350		99,6	99,2		2	- 0
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI	144.990.108	404.200.000	427.170.000	144.760.000	403.700.000		99,8	99,88		92	179
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	144.990.108	404.200.000	427.170.000	144.760.000	403.700.000		99,8	99,88		92	179
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	144.990.108	404.200.000	427.170.000	144.760.000	403.700.000		99,8	99,88		92	179
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLIDUNGAN KOPERASI	390.304.000	309.999.732	152.464.040	386.883.500	308.736.896		99,1	99,59		(36)	- 20

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio antara Realisasi Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	390.304.000	309.999.732	152.464.040	386.883.500	308.736.896		99,1	99,59		(36)	- 20
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	390.304.000	309.999.732	152.464.040	386.883.500	308.736.896		99,1	99,59		(36)	- 20
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	448.335.250	198.000.000	-	422.390.000			94,21		-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio antara Realisasi Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	448.335.250	198.000.000	-	422.390.000			94,21		-	-
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	-	448.335.250	198.000.000	-	422.390.000			94,21		-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	6.017.229.448	6.539.995.566	2.225.474.560	5.961.138.007	6.493.172.837		99,1	99,28		(29)	9
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	6.017.229.448	6.539.995.566	2.225.474.560	5.961.138.007	6.493.172.837		99,1	99,28		(29)	9
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	6.017.229.448	6.539.995.566	2.225.474.560	5.961.138.007	6.493.172.837		99,1	99,28		(29)	9

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Tahun ke-			Rasio antara Realisasi Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	9.947.726.369	13.389.482.925	8.997.011.578	9.757.106.962	13.168.316.227		98,1	98,35		1	35

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.337.887.651	5.417.887.651	5.727.887.651	-	-	-	-	-	-	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.509.050	26.509.050	26.509.050	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.277.080	7.277.080	7.277.080								
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.018.540	8.018.540	8.018.540								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.213.430	11.213.430	11.213.430								

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.065.092.601	2.065.092.601	2.065.092.601	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.054.100.645	2.054.100.645	2.054.100.645								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.698.540	6.698.540	6.698.540								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.293.416	4.293.416	4.293.416								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	110.000.000	115.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.000.000	60.000.000	60.000.000								
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	50.000.000	55.000.000								
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.353.376.000	1.383.376.000	1.388.376.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	30.000.000	30.000.000								
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	45.000.000	45.000.000								

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000	120.000.000	120.000.000								
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	25.000.000	25.000.000								
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	12.000.000	12.000.000								
Penyediaan Bahan/Material	25.000.000	30.000.000	35.000.000								
Fasilitasi Kunjungan Tamu	256.376.000	276.376.000	276.376.000								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	845.000.000	845.000.000	845.000.000								
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	570.000.000	570.000.000	870.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	570.000.000	570.000.000	870.000.000								
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	665.180.000	665.180.000	665.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	12.000.000	12.000.000								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.500.000	180.500.000	180.500.000								

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	472.680.000	472.680.000	472.680.000								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.730.000	597.730.000	597.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.600.000	49.600.000	49.600.000								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.380.000	158.380.000	158.380.000								
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.750.000	89.750.000	89.750.000								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	300.000.000	300.000.000								
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	39.974.224	45.974.224	50.974.224	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	39.974.224	45.974.224	50.974.224	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	39.974.224	45.974.224	50.974.224								
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	41.613.780	45.613.780	55.613.780	-	-	-	-	-	-	-	-
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	41.613.780	45.613.780	55.613.780	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	41.613.780	45.613.780	55.613.780								

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	427.170.000	427.170.000	427.170.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	427.170.000	427.170.000	427.170.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	427.170.000	427.170.000	427.170.000								
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	152.464.040	172.464.040	182.464.040	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	152.464.040	172.464.040	182.464.040	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	152.464.040	172.464.040	182.464.040								

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	198.000.000	250.000.000	198.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	198.000.000	250.000.000	198.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	198.000.000	250.000.000	198.000.000								
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.929.474.560	2.429.474.560	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.929.474.560	2.429.474.560	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.929.474.560	2.429.474.560	3.000.000.000								
	8.126.584.255	8.788.584.255	9.642.109.695	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil telaah terhadap RTRW, dan analisis terhadap KLHS dijumpai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara di Tahun 2024-2026 antara lain sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

Permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi di sektor Koperasi dan UKM menjadi tantangan di Tahun 2024-2026. Tantangan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Kapasitas produksi usaha kecil menengah masih belum optimal.
- b. Pengembangan kualitas produk UKM yang belum maksimal.
- c. Produk UMKM yang belum memiliki legalitas usaha.
- d. Kurangnya fasilitasi branding, promosi dan pemasaran produk unggulan daerah.
- e. Lemahnya penguasaan desain produk unggulan daerah.
- f. Membanjirnya produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif yang mengakibatkan lemahnya daya saing produk.
- g. Terbatasnya kualitas SDM pelaku Koperasi dan UMKM.
- h. Lemahnya kemampuan pelaku koperasi dan UMKM dalam mengakses permodalan.
- i. Rendahnya jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) pelaku usaha.
- j. Lemahnya pemasaran produk UMKM.
- k. Kurangnya sarana pemasaran produk unggulan daerah.
- l. Pendataan UMKM yang masih belum berjalan dengan baik.

2.4.2 Peluang

Penguatan pembangunan ekonomi diarahkan kedalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang lebih seimbang dan merata untuk kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kondisi dan potensi daerah serta peluang yang ada dengan mengutamakan upaya-upaya pemulihan dan pengembangan perekonomian daerah melalui peningkatan kegiatan investasi serta mendorong dan memfasilitaskan upaya-upaya peningkatan produktivitas daerah dan pendapatan

masyarakat.

Oleh karena itu pembangunan ekonomi lebih diprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi lokal yang mempunyai dampak yang luas (*multiple effect*) seperti sektor koperasi dan usaha kecil menengah, karena sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian daerah serta mengembangkan perekonomian pelaku usaha kecil yang ada.

Dengan demikian sesuai dengan tugas dan fungsinya, peranan Dinas menggerakkan dan memperkuat pertumbuhan perekonomian daerah melalui pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan fasilitas pengembangan terhadap pelaku sektor koperasi dan ukm di Kabupaten Batu Bara.

Adapun faktor pendorong yang menjadi peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Kabupaten batu Bara antara lain adalah:

- a. Tersedianya potensi sumber daya alam yang sangat mendukung pengembangan perekonomian.
- b. Meningkatnya kebutuhan barang dan jasa.
- c. Jumlah pelaku usaha koperasi dan UMKM cukup banyak.
- d. Adanya perdagangan bebas yang menjadi peluang bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
- e. Semakin terbukanya bentuk/jenis usaha di masyarakat.
- f. Usaha koperasi dan Usaha mikro menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- g. Kreatifitas dan inovasi bentuk usaha masyarakat semakin beragam.
- h. Mulai berkembangnya produk unggulan daerah.
- i. Tersedianya akses permodalan yang cukup terbuka baik dari program pemerintah pusat maupun dari swasta.
- j. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran produk UMKM.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi. Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara antara lain sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Lambatnya kenaikan level skala usaha mikro menjadi usaha kecil	Rendahnya Persentase Peningkatan level skala usaha mikro ke usaha kecil	Kualitas SDM Pelaku usaha mikro kecil yang masih rendah
			Masih rendahnya akses informasi permodalan bagi pelaku UMKM
			Kurangnya mutu produk UMKM
			Kurangnya pendampingan Atas permasalahan proses produksi usaha mikro kecil
			Produk UMKM masih banyak yang memenuhi aspek legalitas.
			Masih rendahnya kemitraan UMKM dengan pihak swasta
			Kurangnya promosi produk UMKM
			Rendahnya jiwa wirausaha

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kurangnya kreatifitas dan inovasi usaha kecil
			Pola bisnis Usaha Mikro yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan permintaan pasar
			Kurangnya kemampuan tata kelola usaha UMKM
			Kurangnya modal untuk mengembangkan usaha.
2	Masih lemahnya kualitas Koperasi	Rendahnya persentase koperasi aktif	Rapat Anggota Tahunan belum dilaksanakan dengan secara menyeluruh
			Masih banyaknya koperasi tidak aktif, sehingga perlu dibina agar bisa menjadi aktif Lagi
			Kurang berkembangnya usaha produktif koperasi
			Kurangnya kualitas SDM pengurus dan pengelola koperasi
			Kurangnya kemampuan manajemen pengelolaan Koperasi
			Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya

3.2. Telaahan Renstra Kementerian Renstra Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah R.I

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan OPD Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Batu Bara
berdasarkan Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong

Sasaran Strategis Kemenkopukm RI	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Masih lemahnya kualitas Koperasi	1. SDM yang belum Optimal. 2. Kurangnya penguasaan teknologi informasi. 3. Kurangnya kreatifitas dan inovasi dari pengurus koperasi. 4. Kurangnya manajerial perkoperasian.	- Pemberian Pelatihan peningkatan kompetensi SDM - Pemberian Pelatihan digital marketing - Pengembangan kreatifitas dan inovasi dengan pemanfaatan teknologi informasi - Pemberian pelatihan manajerial perkoperasian dan edukasi.
Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Rendahnya kualitas Pelaku UMKM untuk mampu berdaya saing di Pasar Domestik dan Global	1. Belum adanya legalitas usaha 2. Rendahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM dipasar internasional 3. Kurang kapasitas SDM dalam penguasaan teknologi dan pemasaran digital	- Edukasi dan fasilitasi legalitas usaha - Fasilitasi kemasan, branding dan marketing - Pelatihan digital marketing

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Oleh karena itu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara dengan potensi usaha-usaha kecil yang ada dan produk-produk khas daerah Kabupaten Batu Bara seperti songket, tenun, batik dll. Dengan melakukan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi pengembangan usaha, diharapkan akan tumbuh wirausaha baru yang tangguh dan kompetitif serta meningkatkan kemampuan dan pelaku usaha yang sudah kapasitas ada baik dari segi organisasi dan manajemen, dari segi produksi, teknologi, permodalan maupun pemasaran sehingga kegiatan usaha yang ada akan semakin tangguh dan berkualitas/fasilitasi juga diberikan dalam hal peningkatan kerjasama kemitraan antar pelaku usaha itu sendiri maupun dengan instansi pemerintah seperti pembentukan kelompok usaha, pembentukan sentra-sentra usaha, kluster usaha, kemitraan dalam hal penyediaan bahan baku, kemitraan dalam hal pemasaran maupun kemitraan dalam hal permodalan.

Berdasarkan potensi dan upaya-upaya tersebut diharapkan ada peningkatan yang signifikan pada kegiatan usaha baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dengan peningkatan jumlah pelaku usaha baik sektor UKM dan Koperasi, peningkatan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, peningkatan kualitas kelembagaan usaha, peningkatan jaringan pemasaran, peningkatan permodalan, peningkatan kerjasama kemitraan dan peningkatan kesadaran tertib niaga diharapkan akan menciptakan usaha yang tangguh, mandiri dan profesional yang bisa menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Batu Bara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta daya beli masyarakat.

Secara prinsip, seluruh pembangunan dan pengembangan usaha Koperasi UKM disesuaikan dengan penataan ruang dan wilayah sesuai Peraturan Daerah tentang RTRW dimana telah ditentukan dengan jelas rencana pengembangan berbasis kawasan baik kawasan industri, sentra industri, kluster industri maupun kawasan perdagangan.

Visi penataan ruang Kabupaten adalah terwujudnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten berbasis pada potensi sumber daya alam daerah yang didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan harmonisasi antara pengelola kawasan budi daya, kawasan

lindung, dan pengendalian kawasan rawan bencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020- 2040 pada bagian ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 7 poin b menyebutkan bahwa mengembangkan pusat-pusat perkotaan dengan melakukan cluster kegiatan ekonomi pendukungnya. Dapat tersirat artinya bahwa, kegiatan ekonomi pendukungnya salah satunya pengembangan UKM di pusat-pusat perkotaan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor faktor diatas yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah, maka ditentukan isu-isu strategis dalam pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara sebagai berikut: *Bidang Koperasi*

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi.
2. Masih banyaknya koperasi tidak aktif, sehingga perlu dibina agar bisa menjadi aktif lagi.
3. Kurangnya kualitas SDM pengurus dan pengelola koperasi.
4. Kurangnya kemampuan manajemen pengelolaan koperasi.
5. Kurang berkembangnya usaha produktif koperasi.

Bidang Usaha Mikro Kecil

1. Kualitas SDM pelaku usaha mikro kecil yang masih rendah.
2. Masih rendahnya akses informasi permodalan bagi pelaku UMKM.
3. Kurangnya pendampingan atas permasalahan proses produksi usaha mikro kecil.
4. Produk UMKM masih banyak yang memenuhi aspek legalitas.
5. Meningkatkan pemasaran produk UMKM secara optimal.
6. Masih rendahnya kemitraaan UMKM dengan pihak swasta.
7. Kurangnya sarana promosi produk UMKM.
8. Rendahnya jiwa wirausaha.
9. Kurangnya kreatifitas dan inovasi usaha mikro kecil.
10. Pola bisnis Usaha Mikro yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan permintaan pasar.
11. Kurangnya kemampuan tata kelola usaha UMKM.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

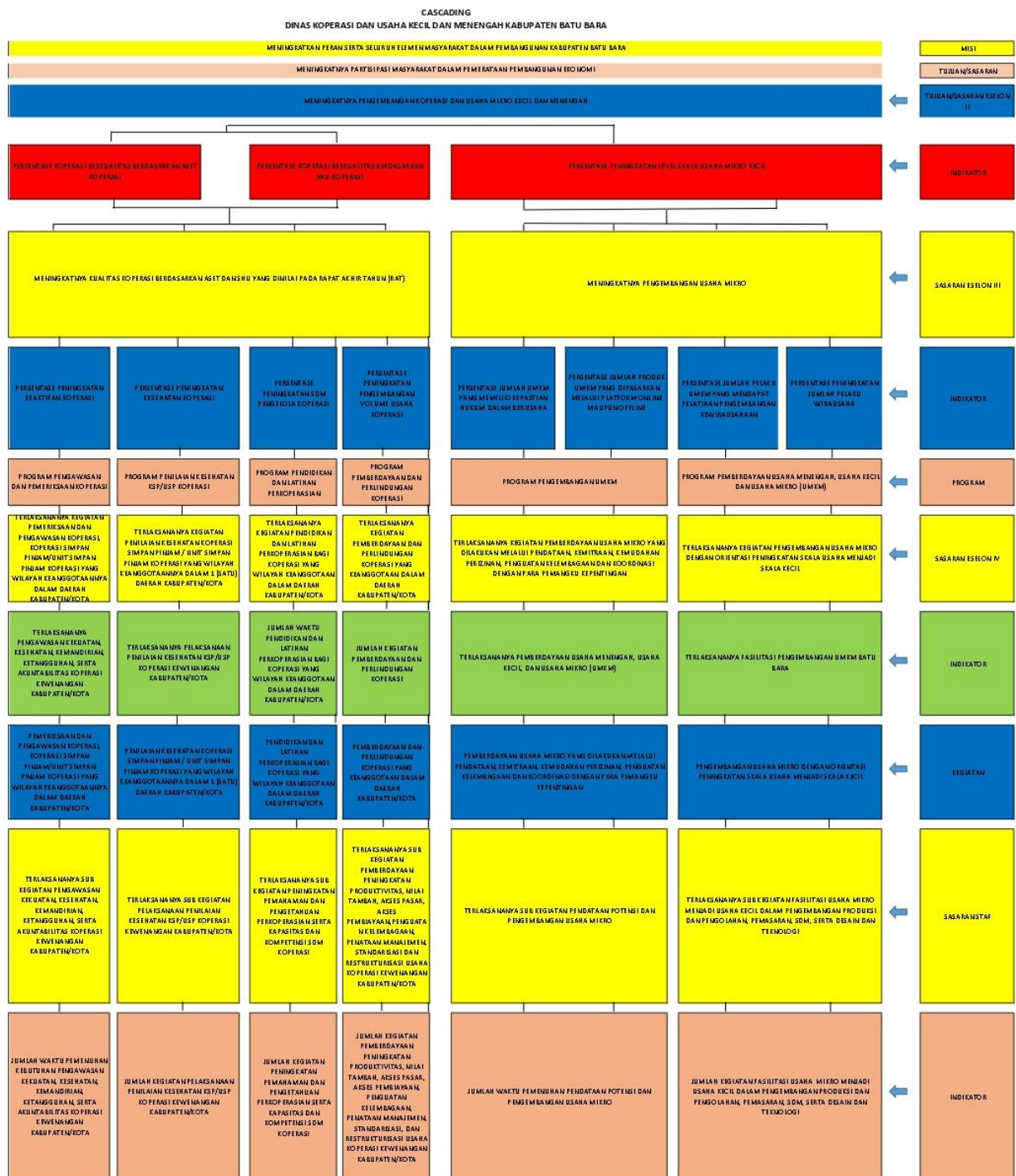
Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) antara lain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batu Bara. Sementara itu, Sasaran merupakan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara beserta indikator dan targetnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Batu Bara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				Satuan	Kondisi Awal	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan Aset Koperasi	%		10	12	13
			Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi	%		4	4,5	5
			Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro	%		0,55	0,6	0,65
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	Nilai		BB	BB	BB

4.2 Cascading Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Batu Bara



Gambar 4. 1
Cascading Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Batu Bara

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan- pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan.

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama tahun 2024-2026 kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor Koperasi dan UKM di Kabupaten Batu Bara.

Rincian atas tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara tiga tahun ke depan dijabarkan dalam matrik pada berikut :

Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	• Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah • Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah • Peningkatan Mutu Produk Usaha UMKM • Fasilitasi Sertifikasi dan Legalitas Produk UMKM
		Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	• Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah • Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi • Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	• Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah • Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah • Fasilitasi penguatan kelembagaan ekonomi kreatif • Pembinaan sertifikasi produksi PIRT bagi pelaku UMKM • Fasilitasi pengembangan kemasan produk UMKM • Fasilitasi pendampingan dan layanan konsultasi bagi usaha mikro kecil dan menengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	• Fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan aneka usahakoperasi • Pengembangan Usaha koperasi pola ekonomi syariah • Pelatihan akuntansi perkoperasian • Penguatan kelembagaan Koperasi Wanita • Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi • Bimbingan Teknis Perubahan Anggaran Dasar Koperasi • Sosialisasi audit dan penilaian kesehatan koperasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah disusun menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan pengembangan serta pengelolaan keuangan daerah serta memperhatikan pembagian kewenangan untuk masing-masing urusan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang 23 tahun 2014.

Program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama periode renstra ini adalah program prioritas daerah yang tercantum didalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara beserta Indikator Capaian Kinerjanya.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 telah dilakukan proyeksi terhadap pendanaan indikatif untuk masing-masing program yang digunakan sebagai dasar penentuan pendanaan indikatif program dan kegiatan perangkat daerah. Untuk selanjutnya secara lengkap keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta kerangka pendanaan indikatif dan target kinerja selama periode Renstra tercantum dalam tabel pada lampiran yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Tabel 6. 1
Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningka tnya kualitas program penunjan g urusan pemerint ah daerah	Terwujudnya program penunjang urusan pemerintah daerah	2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.462.070.591	100%	5.337.887.651	100%	5.417.887.651	100%	5.727.887.651	100%	16.483.662.953	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14.507.000	100%	26.509.050	100%	26.509.050	100%	26.509.050	100%	79.527.150	DISKOP UKM	BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.17.01 .2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	4.947.000	3 Dokum en	7.277.080	3 Dokum en	7.277.080	3 Dokum en	7.277.080	9 Dokum en	21.831.240	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.01 .2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang disusun	4.926.000	2 Dokum en	8.018.540	2 Dokum en	8.018.540	2 Dokum en	8.018.540	6 Dokum en	24.055.620	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.01 .2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan terkait capaian dan realisasi kinerja SKPD yang disusun	4.634.000	2 Dokum en	11.213.430	2 Dokum en	11.213.430	2 Dokum en	11.213.430	6 Dokum en	33.640.290	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	1.792.496.829	100%	2.065.092.601	100%	2.065.092.601	100%	2.065.092.601	100%	6.195.277.803	DISKOP UKM	BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.17.01 .2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pemenuhan gaji dan tunjangan gaji ASN	1.782.590.829	12 Bulan	2.054.100.645	12 Bulan	2.054.100.645	12 Bulan	2.054.100.645	36 Bulan	6.162.301.935	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.01 .2.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	4.982.000	1 Dokum en	6.698.540	1 Dokum en	6.698.540	1 Dokum en	6.698.540	3 Dokum en	20.095.620	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.01 .2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan triwulanan dan semesteran yang disusun	4.924.000	1 Dokum en	4.293.416	1 Dokum en	4.293.416	1 Dokum en	4.293.416	3 Dokum en	12.880.248	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kualitas administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	115.000.000	100%	325.000.000	DISKOP UKM	BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.17.01 . 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	60 stel	60.000.000	60 stel	60.000.000	60 stel	60.000.000	180 stel	180.000.000	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.01 . 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	8 Orang	40.000.000	10 Orang	50.000.000	11 Orang	55.000.000	29 Orang	145.000.000	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kualitas administrasi umum	995.732.687	100%	1.353.376.000	100%	1.383.376.000	100%	1.388.376.000	100%	4.125.128.000	DISKOP UKM	BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.17.01 . 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.900.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000	36 bulan	90.000.000	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.01 . 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.531.500	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	36 bulan	135.000.000	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.01 . 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan Bahan Logistik Kantor	49.991.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.000	36 bulan	360.000.000	DISKOP UKM	BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.17.01 . 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.995.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	25.000.000	36 bulan	70.000.000	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.01 . 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	108.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	36 bulan	36.000.000	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.01 . 2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan Bahan/Material	9.943.500	12 Bulan	25.000.000	12 Bulan	30.000.000	12 Bulan	35.000.000	36 bulan	90.000.000	DISKOP UKM	BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.17.01 .2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	266.320.000	12 Bulan	256.376.000	12 Bulan	276.376.000	12 Bulan	276.376.000	36 bulan	809.128.000	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.01 .2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	484.051.687	12 Bulan	845.000.000	12 Bulan	845.000.000	12 Bulan	845.000.000	36 bulan	2.535.000.000	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kualitas barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.400.878.200	100%	570.000.000	100%	570.000.000	100%	870.000.000	100%	2.010.000.000	DISKOP UKM	BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.17.01 .2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Mesin	1.400.878.200	12 Bulan	570.000.000	12 Bulan	570.000.000	12 Bulan	870.000.000	36 Bulan	2.010.000.000	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	564.764.211	100%	665.180.000	100%	665.180.000	100%	665.180.000	100%	1.995.540.000	DISKO PUKM	BATU BARA
		2.17.01 .2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu pemenuhan jasa surat menyurat	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	12.000.000	36 bulan	36.000.000	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	180.244.211	12 Bulan	180.500.000	12 Bulan	180.500.000	12 Bulan	180.500.000	36 bulan	541.500.000	DISKOP UKM	BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.17.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu pemenuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	372.520.000	12 Bulan	472.680.000	12 Bulan	472.680.000	12 Bulan	472.680.000	36 bulan	1.418.040.000	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	693.691.664	100%	557.730.000	100%	597.730.000	100%	597.730.000	100%	1.753.190.000	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.01 .2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu pemenuhan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	49.198.432	12 Bulan	49.600.000	12 Bulan	49.600.000	12 Bulan	49.600.000	36 Bulan	148.800.000	DISKOP UKM	BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.17.01 .2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau Lapangan	109.865.125	12 Bulan	158.380.000	12 Bulan	158.380.000	12 Bulan	158.380.000	36 Bulan	475.140.000	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.01 .2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	29.630.000	12 Bulan	49.750.000	12 Bulan	89.750.000	12 Bulan	89.750.000	36 Bulan	229.250.000	DISKOP UKM	BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.17.01 .2.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	504.998.107	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	300.000.000	36 Bulan	900.000.000	DISKOP UKM	BATU BARA
Meningkatnya Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Terwujudnya Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Terlaksananya Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	38.566.553	100%	39.974.224	100%	45.974.224	100%	50.974.224	100%	136.922.672	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.03 .2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	38.566.553	100%	39.974.224	100%	45.974.224	100%	50.974.224	100%	136.922.672	DISKOP UKM	BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Kabupaten/Kota											
		2.17.03 .2.01.0 1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Pemenuhan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	38.566.553	12 Bulan	39.974.224	12 Bulan	45.974.224	12 Bulan	50.974.224	36 Bulan	136.922.672	DISKOP UKM	BATU BARA
Meningka tnya Program Penilaian	Terwujudnya Program Penilaian Kesehatan	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP		39.679.350	100%	41.613.780	100%	45.613.780	100%	55.613.780	100%	142.841.340	DISKOP UKM	BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Kesehata n KSP/USP Koperasi	KSP/USP Koperasi		KOPERASI												
		2.17.04 .2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.679.350	100%	41.613.780	100%	45.613.780	100%	55.613.780	100%	142.841.340	DISKOP UKM	BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.17.04 .201.0 1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewengan Kabupaten/Kota	39.679.350	12 Bulan	41.613.780	12 Bulan	45.613.780	12 Bulan	55.613.780	36 Bulan	142.841.340	DISKOP UKM	BATU BARA
Meningka tnya Program Pendidika n dan Latihan Koperasi	Terwujudnya Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		403.700.000	100%	427.170.000	100%	427.170.000	100%	427.170.000	100%	1.281.510.00 0	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.05 .201	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	403.700.000	100%	427.170.000	100%	427.170.000	100%	427.170.000	100%	1.281.510.00 0	DISKOP UKM	BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.17.05 .2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	403.700.000	5 Kegiata n	427.170.000	5 Kegiata n	427.170.000	5 Kegiata n	427.170.000	15 Kegiata n	1.281.510.000	DISKOP UKM	BATU BARA
Meningka tnya Program Pemberd ayaan dan Perlindun gan Koperasi	Terwujudnya Program Pemberdayaa n dan Perlindungan Koperasi	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	308.736.896	100%	152.464.040	100%	172.464.040	100%	182.464.040	100%	507.392.120	DISKOP UKM	BATU BARA
		2.17.06 .2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	308.736.896	100%	152.464.040	100%	172.464.040	100%	182.464.040	100%	507.392.120	DISKOP UKM	BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.17.06 .2.01.0 1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	308.736.896	12 Bulan	152.464.040	12 Bulan	172.464.040	12 Bulan	182.464.040	36 Bulan	507.392.120	DISKOP UKM	BATU BARA
Meningka tnya Program Pemberd ayaan Usaha	Terwujudnya Program Pemberdayaa n Usaha Menengah, Usaha Kecil	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA	Persentase Terlaksananya Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha	422.390.000	100%	198.000.000	100%	250.000.000	100%	198.000.000	100%	646.000.000	DISKO PUKM	BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Menenga h, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	dan Usaha Mikro (UMKM)		MIKRO (UMKM)	Mikro (UMKM)											
		2.17.07 .2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	422.390.000	12 Bulan	198.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	198.000.000	36 Bulan	646.000.000	DISKO PUKM	BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.17.07 .201.0 1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Waktu Pemenuhan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	422.390.000	12 Bulan	198.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	198.000.000	36 Bulan	646.000.000	DISKOP UKM	BATU BARA
Meningka tnya Program Pengemb anan UMKM	Terwujudnya Program Pengemb an UMKM	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Terlaksananya Program Pengembangan UMKM	6.493.172.837	100%	1.929.474.560	100%	2.429.474.560	100%	3.000.000.000	100%	7.358.949.12 0	DISKO PUKM	BATU BARA
		2.17.08 .201	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	6.493.172.837	100%	1.929.474.560	100%	2.429.474.560	100%	3.000.000.000	100%	7.358.949.12 0	DISKO PUKM	BATU BARA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator, Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Restra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perang kat Daerah Penang gung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.17.08 .02.01. 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi	6.493.172.837	20 Kegiata n	1.929.474.560	20 Kegiata n	2.429.474.560	20 Kegiata n	3.000.000.000	60 Kegiata n	7.358.949.12 0	DISKOP UKM	BATU BARA
					13.168.316.227		8.126.584.255		8.788.584.255		9.642.109.695		26.557.278.2 05		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja perangkat daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) ataupun komposisinya (*impact*). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator pilihan yang memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Target pencapaian indikator ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				Satuan	Kondisi Awal	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan Aset Koperasi	%	8	10	12	13
			Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi	%	3,75	4	4,5	5
			Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro	%	0,5	0,55	0,6	0,65
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD	Nilai	BB	BB	BB	BB

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara ini adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 52 Tahun 2022. Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada Tahun 2024 – 2026 dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan. Renstra Tahun 2024 – 2026 ini disebut Renstra Antara dan selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di : Indrasakti

Tanggal :

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BATU BARA**



ARIF HANAFIAH, S.STP.
NIP. 198711152006021002



- ☎ 0811 622 6223
- 📷 diskopukmbatubara
- 📺 DISKOPUKM BATUBARA
- 📘 Dinas Koperasi UKM Batubara
- ✉ diskopukm@batubarakab.go.id
- 🌐 diskopukm.batubarakab.go.id